

MENDUKUNG SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: STUDI LITERATUR KEBIJAKAN SISTEM PENDIDIKAN CHINA, FINLANDIA, JEPANG, DAN INDONESIA

Septaria Dinda Serena¹, Nurul Chasanah², Indi Auliya³

^{1, 2, 3}Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Jl. Pandawa, Jawa Tengah, Indonesia

Email: sept.dinda.s@gmail.com

Article History

Received: 22-12-2023

Revision: 17-02-2024

Accepted: 20-02-2024

Published: 23-02-2024

Abstract. This study aims to identify in several countries related to education system policies that are pro SDGs, especially related to quality education, as well as to identify existing education system policies in Indonesia related to SDGs. This research method is literature by quoting from various reference sources of websites, books, journals consisting of international journals, Sinta journals, and Jenius journals. The 2012 UN Summit produced a renewal called the Sustainable Development Goals (SDGs). There are 17 goals formulated, one of which is related to quality education. Quality education around the world requires absolute education policies to support it. Countries such as China, Finland, Japan, and Indonesia have shown that they support the SDGs on quality education and have their own education policies. Japan has a track record of implementing policies that support the SDGs, including the provision of free education ranging from pre-primary to tertiary education. While Finland, SDGs are one of the seven themes emphasized in the main education curriculum. China's education policy aims to align educational efforts with social and personal resources and improve the quality of education of citizens. Indonesia's policies, among others, aim to increase access to quality education, improve the quality of teachers, education support organizations, improve education services, strengthen, and develop human education with character.

Keywords: Sustainable Development Goals, Policy, Education

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi beberapa negara terkait kebijakan sistem pendidikan yang pro akan SDGs terutama terkait pendidikan berkualitas, serta untuk mengidentifikasi kebijakan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Metode penelitian ini yaitu kepustakaan dengan mengutip dari berbagai sumber referensi *website*, buku, jurnal yang terdiri dari jurnal internasional, jurnal Sinta, dan jurnal Jenius. KTT PBB 2012 menghasilkan sebuah pembaharuan yang diberi nama *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Terdapat 17 tujuan yang dirumuskan, salah satunya terkait pendidikan berkualitas. Pendidikan berkualitas di seluruh dunia memerlukan kebijakan pendidikan yang mutlak untuk mendukungnya. Di negara-negara seperti China, Finlandia, Jepang, dan Indonesia sudah menunjukkan bahwa mereka mendukung SDGs terkait pendidikan berkualitas dan memiliki kebijakan pendidikan mereka sendiri. Jepang memiliki rekam jejak dalam menerapkan kebijakan yang mendukung SDGs, termasuk penyediaan pendidikan gratis mulai dari pendidikan pra-sekolah dasar hingga pendidikan tinggi. Sedangkan Finlandia, SDGs menjadi salah satu dari tujuh tema yang ditekankan dalam kurikulum pendidikan utama. Kebijakan pendidikan Tiongkok bertujuan untuk menyelaraskan upaya pendidikan dengan sumber daya sosial dan pribadi serta meningkatkan kualitas pendidikan warga negara. Kebijakan Indonesia antara lain bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas, meningkatkan kualitas guru, meningkatkan layanan pendidikan, mengembangkan pendidikan manusia yang berakarakter.

Kata Kunci: Sustainable Development Goals, Kebijakan, Pendidikan

How to Cite: Serena, S. D., Chasanah, N., & Auliya, I. (2024). Mendukung Sustainable Development Goals; Studi Literatur Kebijakan Sistem Pendidikan China, Finlandia, Jepang, dan Indonesia. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5 (1), 1225-1237. <http://doi.org/10.54373/imeij.v5i1.689>

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk semua insan di muka bumi. Menurut pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan adalah kegiatan sadar, kegiatan terencana untuk menciptakan lingkungan belajar dan proses belajar bagi peserta didik agar efektif mengembangkan kemampuannya untuk mempunyai wibawa keagamaan dan spiritual. Dikatakan hal ini mengacu pada kekuatan, penguasaan, watak, kecerdasan, gaya kepemimpinan dan keterampilan yang diperlukan bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan merupakan suatu upaya mengembangkan kemampuan siswa dalam memperoleh pengetahuan, moral, dan *skill* yang dibutuhkan dirinya dan masyarakat dengan proses pendidikan. Tirri et al. (2016) mengungkapkan pendapatnya mengenai pendidikan bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan atau meningkatkan *skill* saja, namun lebih dari itu yaitu untuk menjadi pribadi yang terbaik, termasuk mengontrol emosi, spiritual, motivasi, cita-cita, dan hubungannya dengan sekitar. Pendidikan membantu kehidupan dan memperbaiki kehidupan masyarakat dalam segi materi, sehingga memungkinkan mereka menemukan sesuatu dalam hidup (Schinkel et al., 2016). Untuk melaksanakan pendidikan dalam kehidupan tentunya peraturan pemerintah menjadi hal penting dan kebijakan ini disebut dengan kebijakan sistem pendidikan.

Menurut Bell & Stevenson, (2006), mereka berpendapat bahwa pemerintah di seluruh dunia memiliki inisiatif berupa kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan peraturan yang menjamin terselenggaranya suatu sistem pendidikan yang diberikan pada institusi pendidikan membuat rencana untuk memandu keputusan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran persyaratan dapat dipenuhi. Ada dua fungsi kebijakan pengajaran, yakni: Membangun sistem akuntabilitas untuk mengukur kinerja siswa dan guru sebagai penyedia atau pemasok nilai-nilai budaya, menurut pemerintah, harus dimasukkan dalam pendidikan. Viennet and Pont, (2017) mendefinisikan kebijakan pendidikan sebagai proyek yang dibuat oleh otoritas publik yang mencerminkan nilai-nilai dan gagasan yang ditujukan kepada para pelaku dan pengelola pendidikan, serta para profesional. Gaffar (2000) menurut kebijakan pendidikan mengacu pada keputusan tentang langkah-langkah untuk meningkatkan dan menjelaskan kegiatan pendidikan. Menurut Muslim et al. (2021), Indonesia serta negara berkembang lainnya masih menghadapi masalah aturan pendidikan. Hambatan seperti pemerataan, kualitas pendidikan, hasil pembelajaran sekolah dan lembaga, pendanaan, pengelolaan, dan pemantauan yang buruk. Kebijakan pendidikan harus dapat mempengaruhi program dalam sistem pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas.

Sedangkan Yulvinamaesari (2014), berpendapat untuk menciptakan pembelajaran yang melibatkan otak siswa, dapat menggunakan pembelajaran berbasis otak yang memberikan konsep tersebut. Menurut Jie (2016), kebijakan pembelajaran didasarkan pada fokus isi, konteks, proses, dan peran aktor. Anggota suatu kelompok, individu, atau organisasi yang dipengaruhi oleh lingkungan tempat ia tinggal dan bekerja disebut aktor. Ketidakpastian atau persepsi karena sejarah dan budaya merupakan sebagian kecil faktor yang mempengaruhi konteks. Yang mempengaruhi kinerja/proses adalah posisi aktor dalam struktur kekuasaan serta nilai dan harapan aktor. Perumusan kebijakan pendidikan masyarakat sangat dipengaruhi oleh berbagai penerapannya. Pemerintah telah berupaya merevisi kurikulum Indonesia untuk mengakomodasi kompetensi global kebutuhan seperti, berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan berpikir kreatif (Sudarisman, 2015). Berdasarkan kebijakan pendidikan yang akan dilaksanakan pemerintah harus mengelola dan memilih permintaan tersebut. Namun, belakangan ini dunia menemukan ilmu baru bernama *Sustainable Development Goals*. Pada tahun 1987 dalam laporan “*Our Common Future*” ketika Perdana Menteri Norwegia Gro Harlem Brundland mengidentifikasi permasalahan pertumbuhan sosial, pendapatan, dan distribusi, merupakan konsep SDGs berawal. Beberapa inisiatif telah dilakukan, termasuk KTT Rio pada tahun 1992 dan KTT Milenium pada tahun 2000, namun belum rampung. PBB memimpin penetapan 17 target SDGs yang disetujui pada tahun 2015 dan akan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016 dengan tujuan untuk dicapai dalam 15 tahun, pada KTT PBB tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diadakan di Rio pada tahun 2012. Jalur ini dikenal dengan Agenda 2030 yang mempunyai 128 tujuan. Menurut (Otero dan Torres, 2018) “rencana aksi untuk manusia, dunia, dan pembangunan juga berupaya untuk mendorong perdamaian dan kebebasan di dunia”.

Dari 17 *global goals* SDGs yang berhubungan dengan pendidikan meliputi: 1) Menjamin pendidikan yang inklusif dan adil serta mendorong pendidikan berkualitas dan kesempatan belajar bagi semua. 2) Mencapai kesetaraan gender memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. 3) Menjamin akses terhadap energi yang dapat diakses, andal, berkelanjutan, dan terbarukan untuk semua. 4) Menjadikan kota dan pemukiman mudah diakses, aman, fleksibel dan berkelanjutan. 5) Mempromosikan perdamaian sosial, menjamin akses terhadap keadilan bagi semua dan menciptakan lembaga-lembaga yang efektif, akuntabel dan inklusif. dan terakhir, yaitu 6) memperkuat proses implementasi dan pembaharuan kerja sama global (Bolton, 2021). Permasalahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs salah satunya adalah dipengaruhi oleh pendidikan. Permasalahan pendidikan di Indonesia adalah kebijakan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan yang kurang, kurangnya tenaga terlatih dan

mutu fasilitas penunjang pendidikan, pelayanan pendidikan yang perlu dikembangkan dan yang terakhir penguatan dan pengembangan pendidikan manusia masih belum sempurna. Permasalahan tersebut mengundang kebijakan Pemerintah Indonesia dalam upaya pemberdayaan SDGs hal ini mencakup peningkatan akses dan mutu pendidikan, peningkatan mutu guru dan organisasi pendukung pendidikan, peningkatan layanan pendidikan, serta penguatan dan pengembangan pendidikan. Gambaran diatas menunjukkan bahwa pada tema SDGs terkait pendidikan yaitu “pendidikan berkualitas”. Hal ini harus menjadi landasan dalam mengembangkan kebijakan pendidikan nasional. Oleh karena itu, pentingnya melakukan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kebijakan pendidikan yang mendukung SDGs untuk pendidikan berkualitas di banyak negara dan untuk mengidentifikasi kebijakan pendidikan terkait SDGs terhadap kualitas pendidikan di Indonesia, yaitu memikirkan solusinya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode utama yaitu penelitian kualitatif berdasarkan doktrin *post-positivisme* dengan semangat penemuan menurut (Kothari, 2004). Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan analisis isi yang diusulkan, penelitian kepustakaan, teknik analisis dokumen, teknik kompilasi dan manipulasi statistik, dan referensi dan panduan abstrak adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini (Williams, 2007), khususnya dalam membandingkan dan mencari referensi terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam buku, website, dan jurnal internasional untuk referensi terkait kebijakan yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Indikator yang akan dibahas adalah isu *Sustainable Development Goals*, permasalahan yang sering terjadi pada pendidikan di Indonesia, dalam pengupayaan pemerintahan untuk mewujudkan akuntabilitas SDGs.

HASIL DAN DISKUSI

Pendidikan Yang Berkualitas dalam Sustainable Development Goals

Menurut CRC; PBB, (1989) PBB mempunyai agenda yang berlandaskan pada perjanjian internasional HAM dan SDGs adalah standar pendidikan yang tinggi yang didasarkan pada hak-hak anak. Pendidikan berkualitas menurut CRC harus a) focus terkait peningkatan pengembangan keterampilan, kepribadian, pikiran dan tubuh anak; b) mengajarkan arti kebebasan dan HAM, termasuk prinsip-prinsip yang tercantum dalam Piagam PBB; c) menumbuhkan rasa hormat terhadap hubungan dengan budaya, bahasa, dan nilai-nilai nasional negara tempat anak lahir, serta menghormati orang tua. Setiap anak di seluruh dunia memiliki

peluang, tergantung dari beberapa faktor, yakni wilayah geografis, ras, gender, usia, serta status ekonomi.

Di negara-negara miskin bekas jajahan bagian Selatan anak-anak tidak mendapat akses pendidikan yang berkualitas lebih baik jika dibandingkan dengan anak-anak yang berada di negara-negara berkembang dan maju wilayah Utara. Banyak anak-anak di seluruh dunia yang tidak mendapat pendidikan formal yang mereka butuhkan untuk memecahkan soal matematika serta keterampilan dalam membaca huruf, angka, dan simbol yang sedikitnya ada sekitar 40% di seluruh dunia. Terdapat 59 juta siswa yang putus sekolah di bangku sekolah dasar di seluruh dunia pada tahun 2013. Anak laki-laki lebih sering putus sekolah dibandingkan anak perempuan. Selain itu, menurut Nolet (2017) Dua pertiga dari 757 juta orang dewasa di dunia tidak dapat menulis atau berbicara. Perbedaan ras dan etnis yang signifikan dapat ditemukan di seluruh negara bagian. Siswa kulit putih dan penduduk asli Alaska, Hispanik, dan Indian Amerika memiliki tingkat kelulusan yang lebih rendah.\

Boeren (2019) menyatakan bahwa mikro, meso, dan makro merupakan tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami pendidikan berkualitas. Karena mereka menyertakan kebijakan dan statistik partisipasi yang didukung oleh indikator dan tolak ukur, orang tua, anak-anak, remaja, dan pelajar yang lebih tua merupakan pemain mikro yang penting. Mereka diharapkan mendapatkan pengetahuan, keterampilan lebih lanjut saat memasuki dunia pekerjaan dalam ekonomi global. Sayangnya, tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk sukses dalam pendidikan. Penelitian menunjukkan bahwa dari pendekatan mikro, karakteristik sosio-ekonomi dan sosio demografi keluarga menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam hal karakteristik sosial ekonomi dan keluarga. Akibatnya, faktor sosio-demografis dan sosio-ekonomi umumnya terkait dengan sikap, keyakinan, kemauan, dan keinginan untuk belajar dari masyarakat.

Pembelajaran dapat dilakukan di banyak tempat, seperti di lingkungan sekolah, lingkungan kampus, serta lingkungan pekerjaan. Menurut John West-Burnham & Helen O'Sullivan (2019), hasil pendidikan yang baik bergantung pada akses terhadap pendidikan berkualitas tinggi. Karena itu, lembaga pendidikan ini berfungsi sebagai pusat kerja tingkat menengah untuk mengubah kebijakan pendidikan menjadi proses pembelajaran. Guru, instruktur, administrator, dan staf yang berkualifikasi tinggi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan siswa dan melatih para profesional di lembaga pendidikan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan ini berfungsi sebagai pusat kerja tingkat menengah untuk mengubah kebijakan pendidikan menjadi proses pembelajaran. Guru, instruktur, administrator, dan staf yang berkualifikasi tinggi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan siswa dan melatih para profesional

di lembaga pendidikan. Pembelajaran kualitatif tidak mungkin dilakukan karena tidak adanya komunikasi antara tingkat mikro dan meso. Ada tiga elemen yang membentuk metafase. penyediaan infrastruktur dari fasilitas yang tersedia; menyelenggarakan kegiatan belajar dan mengajar, tingkat kualifikasi pekerja (Boeren, 2019).

Selain pentingnya meso, penting untuk mempertimbangkan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aktivitas sekolah karena kebijakan pendidikan masing-masing negara berbeda. Pentingnya interaksi antara tingkatan mikro dan makro, misalnya, karena persyaratan tertentu harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar yang terstandarisasi dan diakui secara resmi atau untuk menerima pendanaan. Secara umum, permasalahan pada tingkat penegakan hukum berkaitan dengan undang-undang dan peraturan ekonomi, sistem pendidikan publik suatu negara atau wilayah, dan opini publik setempat. Para peneliti melakukan studi yang menunjukkan bahwa yang memiliki peluang lebih besar adalah negara dengan tingkat keadilan, kepercayaan terhadap politik, serta demokrasi yang tinggi. Nolet (2017) menyatakan bahwa pendidikan berkualitas dapat tercapai visi misi pendidikannya dengan beberapa strategi yang dapat dilakukan di kelas oleh guru yaitu menerapkan metode pengajaran yang berorientasi budaya dan pendidikan yang berkelanjutan dapat siswa kembangkan dengan bantuan guru.

Ada banyak buku tentang daya tanggap budaya. Pendidikan peka budaya adalah penemuan dan pengembangan kekuatan budaya unik setiap siswa, seperti pengetahuan budaya, pengalaman masa lalu, dan gaya hidup, berdasarkan pengetahuan akademis. Siswa dapat merasa aman dalam dunia budaya di sekitar mereka, meningkatkan kinerja, serta mendukung apa yang telah mereka pelajari dengan memberikan pelatihan terkait budaya. Sebagaimana dinyatakan oleh Nolet (2017), gabungan antara keyakinan seseorang dengan perspektif, pengetahuan, serta nilai dapat membentuk proses menafsirkan, mengamati, serta melakukan interaksi di dunia luar disebut pandangan dunia. Pendidikan berkelanjutan jika dari segi pandangan dunia dapat membantu siswa mempersiapkan diri untuk menghadapi masalah, konflik, dan ketidakpastian sehingga mereka dapat membangun lingkungan yang adil dan aman untuk makhluk hidup di masa depan. Apa yang diucapkan, pilihan yang diambil, dan perilaku seseorang setiap hari dapat digunakan untuk melihat pandangan dunia, Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, siswa mendapat kesempatan untuk memilih gaya belajar mereka sendiri, memilih pembelajaran dari pengalaman yang sebelumnya, serta memilih pengetahuan budaya mereka sendiri, dengan begitu guru dapat membangun lingkungan kelas yang diharapkan. Untuk menggabungkan kedua pendekatan ini, guru dapat menggunakan berbagai metode pengajaran. Mereka dapat membuat lingkungan kelas di mana

setiap siswa memiliki kesempatan untuk menggabungkan pembelajaran dengan pengalaman, ilmu yang terkait budaya, dan gaya belajar mereka sendiri.

Jenis pengajaran yang berbeda dapat digunakan ketika dua pendekatan ini digabungkan. Pertama, siswa harus memiliki tujuan belajar yang jelas dan dapat diterapkan. Siswa juga dapat menggunakan kegiatan yang dirancang untuk membantu mereka mengingat dan merenungkan tujuan mereka. Beritahu semua siswa bahwa guru mereka telah meminta mereka untuk berkomitmen pada prestasi tinggi dan bahwa guru juga berkomitmen untuk mendukung upaya mereka. Buatlah lingkungan yang aman di mana siswa dapat saling mengenal dan berbicara di depan umum tentang hal-hal seperti ras, kelas, gender, identitas, peluang, dan keistimewaan. Pengaturan seperti itu dapat membantu pendidik belajar tentang diri mereka sebagai orang kritis.

Kedua, selain memberikan kesempatan pendidik dan siswa berkolaborasi dengan berbagai keyakinan, guru harus mengetahui tentang sistem hukum struktural yang berlaku di masyarakat. Selain itu, mereka harus mempertimbangkan keyakinan dan prasangka mereka sendiri. (Taylor et al., 2019), membantu siswa memahami aturan yang mendasari perspektif dunia yang berkelanjutan, serta aturan yang diikuti orang lain dan mereka sendiri. Guru harus membantu mereka dengan membimbing mereka mengenai hal-hal yang mereka anggap tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat yang lebih besar atau dengan nilai-nilai yang penting untuk membangun lingkungan yang aman dan adil sekarang dan di masa depan. Untuk menciptakan lingkungan yang aman di mana siswa dapat menemukan, menjelaskan, dan mempelajari nilai-nilai mereka sendiri dan orang lain dalam lingkungan yang aman dan mendukung, memerlukan pemastian standar, prosedur, dan praktik struktur yang jelas yang mengkomunikasikan prinsip inklusi dan harapan positif. (Nolet, 2017).

Ketiga, gunakan pendekatan yang berpusat pada siswa. pendekatan ini membantu siswa dalam memecahkan masalah yang sebenarnya. Pembelajaran berpusat pada siswa dapat dipromosikan dengan berbagai cara, seperti pengajaran yang berpusat pada peserta didik, pengajaran yang mendorong pemahaman melalui kolaborasi, dan strategi terfokus pada peserta didik. Strategi-strategi ini termasuk pembelajaran kooperatif dalam kelompok kecil, berbasis penelit, dan guru mengambil lebih banyak tanggung jawab untuk mengelola pembelajaran mereka sendiri, pembelajaran berdasarkan pengalaman, pembelajaran pengabdian dan pembelajaran tempat. (Nolet, 2017).

Keempat, perhatian tertuju pada masalah yang berkaitan dengan kehidupan anak-anak. Selalu melibatkan siswa dengan dalam pembelajaran, baik di dalam maupun di luar kelas, membantu siswa membuat hubungan dengan peristiwa kurikuler yang terjadi di komunitas

mereka dan di kehidupan mereka sendiri. Mendorong siswa untuk mengeksplorasi aspek budaya dan identitas seseorang serta menemukan cara untuk menerapkan pengetahuan ini untuk masalah budaya nyata. Selain itu, memungkinkan mereka melihat situasi dan jalannya untuk mengetahui sama pentingnya dan signifikannya dengan apa yang terjadi di komunitas lain atau di seluruh dunia, bagian umum dari penelitian yang lebih dalam identitas sendiri adalah mendorong siswa untuk mempelajari riwayat pribadi dan keluarga mereka. Misalnya, membantu siswa memahami kompleksitas dan ambiguitas dalam berbagai konteks dapat membantu mereka mengidentifikasi dan berpartisipasi dalam kelompok orang yang berbeda, yang memungkinkan mereka untuk melihat kehidupan ini yang penuh dengan ambiguitas dan kompleksitas yang tidak dapat dijelaskan atau diselesaikan dengan cukup. Salah satu cara guru dapat membantu siswa menyelesaikan masalah dengan lebih baik adalah dengan memasukkan masalah nyata ke dalam kurikulum. Contoh-contoh ini akan memodelkan cara siswa berpikir dan membuat keputusan terkait dengan masalah tersebut.

Kelima, melibatkan siswa dalam berbagai bentuk pemikiran kritis dan reflektif memberikan kesempatan kepada mereka untuk menerapkan elemen pemikiran kritis dalam berbagai konteks, memungkinkan siswa untuk menganggap pemikiran kritis sebagai sesuatu yang mereka lakukan setiap hari. membuat protokol dan kebiasaan yang membantu siswa menantang dan menjelaskan asumsi, merenungkan prasangka sendiri, menentang masalah dengan bukti, tidak setuju dengan konstruktif dan hormat, dan menghadapi teka-teki yang sulit. Siswa juga harus diajarkan bagaimana berpikir kritis merupakan bagian dari pandangan dunia tentang pembangunan berkelanjutan. Mereka harus diajarkan cara mengajukan pertanyaan yang sulit dan menggunakan model berpikir kritis untuk melatih pemikiran kritis. Terakhir, beri siswa rasa tanggung jawab dan kebebasan untuk membuat keputusan.

Pendidikan sangat penting untuk keberlanjutan, karena memberdayakan kaum muda untuk mengatasi ketidakadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dialami dunia saat ini. Guru dapat membantu siswa menyelesaikan masalah rumit yang mereka hadapi saat ini dan yang akan mereka hadapi di masa depan, dengan menggunakan pendekatan yang membantu mereka mengembangkan keterampilan budaya dan pandangan dunia keberlanjutan.

Kebijakan Pendidikan untuk Mendukung SDGs di Jepang

Voluntary National Review: Report on the Implementation of the Sustainable Development Goals, dokumen yang dipublikasikan di website *Ministry of Foreign Affairs of Japan* menunjukkan bahwa Jepang sangat mengutamakan implementasi SDGs dalam hal pendidikan berkualitas tinggi. Terbukti dengan, menerapkan pendidikan gratis mulai dari usia

dini hingga sekolah menengah dengan meluncurkan program beasiswa hibah untuk menurunkan suatu biaya pendidikan yang diperoleh siswa Jepang. Jepang juga berusaha meningkatkan pendidikan untuk kesetaraan gender dan memenuhi suatu kebutuhan khusus bagi anak-anak penyandang cacat (Kementerian Luar Negeri, 2017).

Finlandia

Dalam Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan di Finlandia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Finlandia, Anttila (2014) menyatakan bahwa negara telah mengembangkan kerangka kerja strategi yang relevan di seluruh negara untuk menerapkan pertumbuhan dan pendidikan berkualitas melalui berbagai acara yang melibatkan berbagai pihak. SDGs Ini perlu dimasukkan ke dalam program dan kebijakan nasional yang bersifat relevan untuk mencapainya. Bertujuan agar bisa diterapkan pada kehidupan sekolah dan masyarakat umum.

Pendidikan dasar di Finlandia terdiri dari sembilan tahun sekolah komprehensif gratis untuk seluruh kelompok umur. Hampir semua anak telah selesai sekolah wajib, menunjukkan bahwa ruang kelas pada skala mini menawarkan suatu lingkungan belajar yang inklusif bagi semua siswa. Sejak tahun 2006, SDGs telah menjadi salah satu dari tujuh topik utama dalam kurikulum inti sekolah dasar. Kurikulum 2006 diubah, mulai dari kurikulum baru pada tahun 2016. Kurikulum 2016 memprioritaskan SDGs, pendidikan akan didasarkan pada pemahaman eko-sosial dan kebutuhan akan gaya hidup yang berkelanjutan. Budaya kerja di sekolah diharapkan menjadi komunitas pembelajaran yang bertanggung jawab atas masa depan dan lingkungan. Tujuan pendidikan ditetapkan untuk kemampuan berbasis subjek dan transversal. "Partisipasi, pengaruh, dan membangun masa depan yang berkelanjutan" adalah salah satu dari tujuh domain kemampuan transversal. Tujuan dari mata pelajaran untuk meningkatkan kemampuan di bidang ini adalah untuk membantu siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan prinsip yang membantu mereka memahami nilai yang bertahan pada masa depan dan bertindak sebagai warga negara yang bertanggung jawab dari sudut pandang individu, regional, dan internasional.

China

Selaras dengan tujuan reformasi pendidikan Tiongkok, yaitu meningkatkan aksesibilitas, kapasitas, kualitas pembelajaran, dan kesetaraan pendidikan, kebijakan negara memprioritaskan pendidikan berkualitas tinggi. Anggota Komite Pendidikan Nasional melakukan perbandingan antara pendidikan nasional dan SDGs untuk kualitas pendidikan.

Tiongkok berfokus pada peningkatan pemahaman, nilai, sikap, dan kinerja siswa, serta daya masyarakat dan individu untuk mengatasi hal ini. Beijing dianggap sebagai kota pendidikan.

Pemerintah Kota Beijing dan Komite Partai Kotamadya secara resmi mengumumkan pembangunan Gedung Pembelajaran di Beijing. Tujuan pembangunan kota belajar adalah untuk mempercepat sistem pendidikan seumur hidup dan layanan pembelajaran seumur hidup di ibu kota, membangun organisasi pendidikan, dan meningkatkan sistem perlindungan untuk membangun lembaga pendidikan. Selain itu, lembaga berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan pendidikan setiap orang dan mendukung pengembangan proyek baru. Sulit untuk memenuhi kebutuhan pendidikan setiap orang.

Pengetahuan, penelitian, dan praktik di Tiongkok mendukung tujuan membangun komunitas belajar, komunitas pembelajar tidak hanya pada bidang pendidikan tetapi juga di dalam sektor kemasyarakatan lain dalam bidang pendidikan tetapi juga dalam bidang kemasyarakatan lainnya. Menurut Yuan dkk, (2019) inisiatif Beijing untuk membangun kota pembelajaran telah mencapai hasil yang melampaui rata-rata dan memberikan peluang unik bagi kota tersebut. Oktober 2013, China Kementerian Pendidikan Pendidikan dan Organisasi Pendidikan, Manajemen Pengetahuan Kementerian dan Organisasi Pendidikan, Manajemen Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO) Keputusan resmi tentang suatu Pembangunan Gedung Pembelajaran di Beijing menjelaskan suatu tujuan dan fungsi pembangunan kota belajar Beijing, terdiri dari memeperecepat pembentukan suatu sistem pendidikan dan layanan pembelajaran seumur hidup di ibu kota; membangun organisasi pendidikan; dan memperkuat sistem perlindungan untuk membangun kota belajar. Lembaga pendidikan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan pendidikan setiap orang dan mendukung pengembangan proyek - proyek baru. Di Tiongkok mendukung tujuan membangun komunitas pembelajar, tidak hanya pada bidang pendidikan tetapi juga di suatu sektor kemasyarakatan.

Indonesia

SDGs untuk pendidikan berkualitas pendidikan tinggi di Indonesia meniru sistem pendidikan Yogyakarta, di Indonesia telah mencontoh sistem pendidikan Yogyakarta. Sedangkan ini dengan apa yang Badan Perencanaandisampaikan Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah Yogyakarta dalam websitenya (Yogyakartabappeda.jogjaprovo.go.id) yang menyatakan bahwa ada delapan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai SDGs. Hal ini mencakup tujuan *Pertama* , yaitu memastikan bahwa anak - anak dan remaja mempunyai akses terhadap pendidikan dasar dan dewasa serta pendidikan tinggi, termasuk universitas dengan standar kualitas yang tinggi. *Kedua*, perbedaan persepsi gender. *Ketiga*,

pengembangan dan peningkatan pendidikan yang berpusat pada anak, peningkatan fasilitas pendidikan yang berpusat pada anak. Apalagi meningkatkan jumlah guru yang berkualitas. SDGs bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya pembelajaran yang peka dan konsisten dengan konteks sosial dan politik yang lebih luas. Tujuan secara spesifik terbagi dalam empat kategori: 1) peningkatan taraf pendidikan dan sumber belajar; 2) peningkatan taraf pelayanan pendidikan; dan 3) menekankan dan mengembangkan pendidikan karakter (Dinas Perencanaan dan Pembangunan Daerah DIY, 2021).

Tujuan SDG adalah untuk meningkatkan kualitas manajemen dan pelayanan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Hal ini mencakup peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas pendidik dan sarana pendukung pendidikan, peningkatan layanan pendidikan, dan penguatan, pengembangan karakter pendidikan (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah DIY, 2021). Semua pihak, baik pemerintah maupun non-pemerintah, harus bekerja sama untuk mencapai tujuan yang disebutkan di atas melalui program dan kegiatan seperti meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar dan menengah; meningkatkan daya saing, relevansi, dan akses ke pendidikan tinggi, dan meningkatkan pendidikan usia dini dan anak-anak.

Pendidikan terkait SDGs hanya terbatas di provinsi Yogyakarta, salah satu solusi yang mungkin dilakukan adalah provinsi lain di Indonesia juga dapat mengadopsi program ini dengan menganalisis apa yang saat ini sedang dilakukan di provinsi Yogyakarta. Selain itu, pemerintah mempunyai kemampuan untuk menegakkan hukum di negara-negara tersebut, serupa dengan apa yang mungkin dilakukan di Indonesia.

KESIMPULAN

Strategi yang berbeda digunakan untuk menerapkan SDGs di beberapa negara seperti Jepang, Finlandia, China, dan Indonesia. Kebijakan pendidikan masing-masing negara menjadi indikator pencapaian SDGs, dan kebijakan pendidikan menunjukkan implementasi SDGs dalam pendidikan berkualitas tinggi di masing-masing negara. Di Jepang, pendidikan gratis diterapkan sejak usia dini hingga sekolah menengah pertama. Negara ini juga berupaya meningkatkan pendidikan khusus bagi anak-anak penyandang disabilitas dan mendorong kesetaraan gender dalam pendidikan. Jepang juga akan mendukung pendidikan terkait SDGs dengan memperbaiki kurikulum dan menyesuaikan materi pembelajaran dengan pedoman kurikulum baru negara tersebut.

Salah satu dari tujuh tema utama dalam kurikulum sekolah dasar di Finlandia adalah SDGs. Kesadaran sosial lingkungan dan gaya hidup berkelanjutan akan menjadi fokus dari kurikulum

2016. Tujuan sekolah juga ditetapkan, baik terkait mata pelajaran maupun lintas sektoral. Namun, reformasi Tiongkok menganggap kualitas pendidikan sebagai masalah strategi dalam dan pembangunan pendidikan, tekanan pada tujuan reformasi pendidikan untuk meningkatkan kesetaraan akses, meningkatkan kualitas pendidikan, dan meningkatkan kapasitas sumber daya. Untuk mendukung hal tersebut, Tiongkok fokus pada peningkatan pengetahuan, nilai, sikap, dan perilaku siswa. Kebijakan dan proyek yang dilaksanakan memfokuskan pendidikan pada sumber daya masyarakat dan individu, dan mengembangkan pendidikan kewarganegaraan seperti pemikiran kritis, keterampilan memecahkan masalah, keterampilan komunikasi dan kepemimpinan, kemampuan mengambil keputusan dalam situasi yang tidak pasti, dan keterampilan memecahkan masalah. Tiongkok juga menjadikan Beijing sebagai kota pembelajaran. Yogyakarta, Indonesia, menunjukkan kualitas dalam SDGs pendidikan. Untuk mencapai hal tersebut, kebijakan dibuat untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, meningkatkan kualitas guru dan fasilitas pendidikan, meningkatkan pelayanan pendidikan, dan mengembangkan dan memperkuat karakter pendidikan.

REFERENSI

- Álvarez-Otero, J., & de Lázaro y Torres, M. L. (2018). Education sustainable development goals using the spatial data infrastructures and the TPACK model. *Education Sciences*, 8(4), 1–14. <https://doi.org/10.3390/educsci8040171>
- Anttila, K. (2014). Education for sustainable development-best practices from Finland. In *UNESCO World Conference on Education for Sustainable Development*, 10–12.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY. (2021). *Sustainable Development Goals; Pendidikan Bermutu*. Bappeda.Jogjaprovo.go.Id. <http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/sdgs/detail/4-pendidikan-bermutu>
- Bell, L., & Stevenson, H. (2006). Education policy: Process, themes and impact. *Education Policy: Process, Themes and Impact*, 1–192. <https://doi.org/10.4324/9780203088579>
- Boeren, E. (2019). Sustainable Development Goal (SDG) four on “great education” understanding from micro, meso and macro perspectives. *International Review of Education*, 65 edisi 2, 277–294. <https://doi.org/10.1007/s11159-019-09772-7>
- Bolton, M. (2021). Public area know-how of sustainable improvement and the sustainable improvement goals: A case have a look at of Victoria, Australia. *Current Research in Environmental Sustainability*, 3, 100056. <https://doi.org/10.1016/j.crsust.2021.100056>
- Gaffar, M. Fakry. (2000) *Dana Pendidikan: Permasalahan dan Kebijaksanaan dalam Perspektif Reformasi Pendidikan Nasional*, Bandung: IKIP Bandung.
- Han, Q. (2015). Climate Change Education and Education for Sustainable Development in China: A Status Report. *Journal of Education for Sustainable Development*, 9(1), 62–77. <https://doi.org/10.1177/0973408215569114>
- Jie, N. D. (2016). Towards A Framework of Education Policy Analysis. *The HEAD Foundation*. https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Jie%2C+N.+D.%2C+2016.+Towards+A+Framework+of+Education+Policy+Analysis.+s.l.%3AThe+Head+Foundation.&btnG=

- Kothari, C. (2004). Research methodology: methods and techniques. In *New Age International* (Second Rev). New Age International Publisher. <https://doi.org/http://196.29.172.66:8080/jspui/bitstream/123456789/2574/1/Research%20Methodology.pdf>
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2017). *Japan's Voluntary National Review : Report at the Implementation of the Sustainable Development Goals*.
- Nolet, V. (2017). Quality Education: Cultural Competence and a Sustainability Worldview. *Kappa Delta Pi Record*, 53(4), 162–167. <https://doi.org/10.1080/00228958.2017.1369276>
- Schinkel, A., De Ruyter, D. J., & Aviram, A. (2016). Education and Life's Meaning. *Journal of Philosophy of Education*, 50(3), 398–418. <https://doi.org/10.1111/1467-9752.12146>
- Sudarisman, S. (2015). Memahami hakikat dan karakteristik pembelajaran biologi dalam upaya menjawab tantangan abad 21 serta optimalisasi implementasi kurikulum 2013.. *Jurnal Florea*, 2(1), 29–35. <http://doi.org/10.25273/florea.v2i1.403>. Jurnal Jenius
- Taylor, N., Quinn, F., Jenkins, K., et al. (2019). A Review Education for Sustainability within side the Secondary Sector. *Journal of Education for Sustainable Development*, 13(1), 102–122. <https://doi.org/10.1177/0973408219846675>
- Tirri, K., Moran, S., et al. (2016). Education for purposeful teaching around the world. *Journal of Education for Teaching*, 42(5), 526–531. <https://doi.org/10.1080/02607476.2016.1226551>
- United Nations. (2021). *Equitable excellent training, Ensure inclusive and sell life long mastering possibilities for all*. Sustainable development.Un.Org. <https://sdgs.un.org/goals/goal4>
- UU RI No 20 Thn 2003. (2003). Sistem Pendidikan Nasional. *Republik Indonesia*, 159– 170.
- Viennet, R and Pont, B. (2017). Education Policy Implementation. *OECD Education Working Papers Series*, 162. 375.
- Williams, C. (2007). Research methods. *Journal of Business & Economic Research*, 5(3), 65–72. <https://doi.org/10.1017/9781108656184.003>
- Yuan, D., Gui, M., & Shen, X. (2019). Building a Learning City for Sustainable Development: Spotlight on Beijing, RRC. *New Directions for Adult and Continuing Education*, 2019(162), 37–48. <https://doi.org/10.1002/ace.2032>
- Yulvinamaesari. (2014). Implementasi Brain Based Learning Dalam Pembelajaran. In *Prosiding Seminar Nasional* (Vol. 1, pp. 100–102).